



MODEL KEPEMIMPINAN KOMUNITAS DALAM PENATAAN PEMUKIMAN KUMUH

(Studi kasus pada RW 014 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Kota administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta)

Oleh

Zaenal Fanani¹⁾ & Teguh Kurniawan²⁾

^{1,2}Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: [1enalkreo@gmail.com](mailto:enalkreo@gmail.com)

Abstrak

Kepemimpinan merupakan faktor yang penting dalam menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Keberhasilan dalam memperbaiki lingkungan kumuh sangat dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan di wilayah utamanya dalam menggerakkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan agar selalu terjaga dan bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan komunitas yang dapat memotivasi masyarakat sehingga dapat menimbulkan kesadaran menjaga lingkungan dan konsistensi terhadap apa yang telah dijalankan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan tersebut. Data diperoleh melalui wawancara dan studi literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa sosok kepemimpinan komunitas yang tegas dan berwibawa sangat diperlukan dalam wilayah RW kumuh karena masyarakat akan menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari pemimpin wilayah dengan tumbuhnya kesadaran dalam diri mereka karena rasa hormat mereka terhadap pimpinan. Faktor yang paling berpengaruh dalam kepemimpinan komunitas adalah ketegasan dan kewibawaan yang membawa perubahan pola pemikiran masyarakat dan menjadi budaya kerja yang baik dan berkelanjutan sehingga mampu mengubah lingkungan kumuh menjadi lingkungan yang bersih, indah dan tertata rapi.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kebijakan, Masyarakat & Rapi

PENDAHULUAN

Tempat tinggal rakyat merupakan objek yang penting dalam kebijakan publik. Tempat tinggal, bagi rakyat, merupakan ruang dan tempat dalam menghabiskan sebagian besar waktunya. Mulai dari aktivitas domestik hingga aktivitas pekerjaan. Karenanya, rumah-rumah rakyat adalah cermin bagaimana kebijakan publik di sebuah wilayah administratif. Jika wilayah kumuh, maka pantulan pemangku kebijakan muram yang akan terlihat.

Di kota-kota besar Asia Tenggara, perubahan pemerintahan dan bisnis dari kolonisasi menuju industrialisasi telah membawa beberapa perubahan. Migrasi besar-besaran penduduk berpendapatan rendah untuk menjadi buruh atau pekerja di kota industri

menciptakan perubahan wilayah dengan ditempati masyarakat kelas pekerja. Masyarakat kelas menengah-bahwa akan semakin mendekati wilayah dengan pendapatan yang tinggi, menjadi salah satu faktor. Penduduk berpendapatan rendah terus merangsek memasuki pusat kota yang membutuhkan pembangunan tiada akhir untuk keperluan bisnis dan tempat tinggal kelas atas (high-end development). Sementara itu, lemahnya peraturan larangan pendirian di beberapa titik pusat kota, menjelaskan kegigihan penduduk miskin untuk mendirikan permukiman kumuh dan permukiman liar di daerah inti kota-kota Asia Tenggara (Silver, 2007: 32).

Kebijakan publik dalam perumahan wilayah perkotaan sangat menjadi perhatian



besar dunia. Berdasarkan data..UN-Habitat,..the United Nations Programme for Human Settlements, lebih dari 50% populasi dunia tinggal di pusat kota atau wilayah urban. Wilayah urban memiliki peran penting dalam meraih tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tiga milyar akan menjadi kaum urban antara tahun 2010 dan 2015, serta 80% GDP disumbangkan dari wilayah perkotaan (UN Habitat, n.d). Sayangnya, berdasarkan data UN Habitat (2017: 56), dalam negara berkembang, sekitar 881 juta penduduk kota tinggal di permukiman kumuh pada tahun 2014, sebagian disebabkan oleh ketidakefektifan lahan dan kebijakan perumahan, di antara faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Kebijakan kumuh, bahkan menjadi manifestasi nyata dari kemiskinan dan ketidakadilan.

Kondisi tempat tinggal kumuh di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Melalui Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemerintah mengungkapkan data bahwa luas kawasan kumuh di Indonesia pada 2019 ialah seluas 87.000 hektare, padahal, pada 2014 luasnya masih dalam kisaran angka 38.000 hektare. Hingga akhir 2019, pemerintah telah menangani kawasan kumuh sekitar 32.000 hektar dari 38.000 hektar yang menjadi target sampai 2020, sehingga diharapkan luasan wilayah kumuh yang belum dientaskan akan semakin sedikit (CNN, 2019).

Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2017 memiliki 445 Rukun Warga (RW) yang termasuk dalam kategori kumuh. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 RW masuk kedalam kategori kumuh berat, sementara 99 RW masuk dalam kategori kumuh sedang, lalu yang berstatus kumuh ringan adalah 215 RW, dan sisanya sebanyak 126 RW masuk ke dalam status kumuh sangat ringan. Dasar penilaian RW kumuh dapat dilihat dari beberapa variabel antara lain, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kualitas bangunan yang buruk, kondisi ventilasi dan pencahayaan yang buruk, lalu kondisi jamban buruk, kondisi

saluran air dan penerangan jalan umum. Bekerjasama dengan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) per wilayah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penataan RW kumuh tersebut sampai dengan 2022 (BPS, 2018).

Kondisi kampung kumuh di pusat kota merupakan hasil dari sebuah kebijakan publik yang baik, terutama dalam bidang penataan perumahan yang didukung oleh beberapa indikator lainnya. Pentingnya kebijakan publik membuat UN-Habitat pun turut berpartisipasi dalam pengembangan perumahan rakyat dan pengentasan kampung kumuh dengan pelbagai level pemerintahan untuk memformulasi dan mengimplementasikan kebijakan dan legislasi yang mendukung terealisasinya perumahan yang layak sebagai elemen dasar atas hak layak hidup bagi semua orang, meningkatkan pasokan perumahan yang memadai dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas dari permukiman kumuh yang ada, serta meredam dan menghentikan pertumbuhan perumahan kumuh yang baru (UN Habitat, 2017: 56). Komitmen pemerintah internasional dalam penciptakan kebijakan publik yang inklusif dan partisipatif dalam perbaikan kondisi perumahan rakyat yang layak seharusnya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah lokal, khususnya di daerah Jakarta.

Beberapa usaha penanganan wilayah kumuh di Jakarta telah dilakukan dari masa ke masa, sebut saja masa kepemimpinan gubernur Sutiyoso, Fauzi Bowo dan Ahok yang menyelesaikan wilayah kumuh dengan penggusuran dan pemindahan ke rusunami dan rusunawa. Sedangkan era Gubernur Jokowi ada usaha untuk tidak menggusur namun mengganti dengan program kampung deret, sementara era gubernur Anies Baswedan memilih menggunakan program CAP (Community Action Plan) dan CIP (Colabotative implementation Plan).

Berbagai usaha telah dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan wilayah kumuh namun sampai



saat ini belum dapat menuntaskan secara maksimal.

Ditengah permasalahan wilayah kumuh, ada satu wilayah RW kumuh di DKI Jakarta yang mampu memperbaiki wilayahnya dengan kesadaran masyarakat yang tumbuh karena termotivasi oleh kepemimpinan Ketua RW nya, wilayah tersebut adalah RW 014 kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Kota Administrasi Jakarta Barat yang masuk dalam daftar RW kumuh di Jakarta Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sosok kepemimpinan dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat lingkungan kumuh terkait perbaikan lingkungan kumuh menjadi lingkungan yang tertata rapi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan komunitas tersebut. Dalam melakukan study ini didasarkan pada Teori Kempimpinan Kompleksitas (e.g. Keene, 2000; Onyx and Leonard, 2011; Uhl-Bien et al., 2007), ada tiga jenis kepemimpinan menurut mereka yakni (1) kepemimpinan administratif bersifat hierarkis dan mengendalikan; (2) kepemimpinan yang memungkinkan mendorong pemecahan masalah, pembelajaran, dan kemampuan beradaptasi yang kreatif; dan (3) kepemimpinan adaptif adalah dinamika yang memberdayakan perubahan (Uhl-Bien et al., 2007:299).

LANDASAN TEORI

Pengertian Kampung Kumuh

Secara fisik, kampung merupakan ruang yang terbuka bagi siapapun untuk bermukim dengan pelbagai kriteria kesepakatan, biasanya harga sewa terjangkau. Ada keterbukaan ruang kehidupan kampung dalam dimensi sosial dan ekonomi, yang ditunjukkan oleh keguyuban warga dan kebebasan menentukan peluang ekonomi rumahan (Sutanudjaja, dkk. 2019:11).

Kampung kumuh seharusnya bisa menjadi salah satu hal yang diberi perhatian oleh kebijakan publik, setidaknya dalam arti kepemilikan data statistik yang akurat tentang keadaan pasokan perumahan dan apakah itu membaik atau memburuk. Kampung adalah

salah satu kelompok – jika kondisinya mengacu pada kehidupan komunitas masyarakat dalam bermukim – rentan. Mereka rentan terancam keamanan bermukimnya di antara kesewenang-wenangan kekuasaan. Mereka pun rentan terhadap perang wacana tentang kehidupan kampung baik dan buruk, atau legal dan ilegal. Selain itu, ada kerentanan ekosistem di dalam kehidupan kampung itu sendiri. (Sutanudjaja, dkk. 2019:11).

Kenapa kampung patut diperhitungkan untuk dapat eksis dalam kehidupan masa mendatang? Tentunya kenyataan ini bukan sekadar guyonan belaka. Kampung pada dasarnya merupakan gairah kehidupan dalam berkomunitas. Maka kata hunian layak juga merupakan definisi atas lingkungan tempat tinggal yang memiliki hubungan ketetanggaan dan saling mengenal satu sama lain. Hubungan yang begitu kuat tersebut membentuk sebuah komunitas sebagai esensi hidup, dan biasanya selalu terjadi di kampung-kampung. Namun tidak dapat dipungkiri, kekuatan komunitas yang kuat tersebut bisa saja terpecah secara perlahan. Perpecahan-perpecahan tersebut bisa diakibatkan oleh kuatnya nilai individual yang dilakukan negara, terutama dalam hukum dan kebijakannya, serta peran kerja modal yang kerap melalaikan kehidupan komunitas dan batas-batas kehidupan (Sutanudjaja, dkk. 2019:67).

Definisi yang dapat disimpulkan dari beberapa kesan yang timbul terkait permukiman kumuh yang diungkapkan oleh para ahli adalah sebagai berikut: Permukiman kumuh adalah suatu kondisi permukiman yang padat, terdapat rendahnya kualitas konstruksi, minimnya pelayanan dan prasarana adalah pengejawantahan kemiskinan (Kuswartojo, 2005:19). Sedangkan Parsudi Suparlan (1984:23) berpendapat bahwa permukiman kumuh adalah tempat tinggal atau permukiman orang-orang miskin kota yang padat penduduk, masih adanya lorong-lorong kotor dan merupakan bagian dari kota secara keseluruhan, juga biasa disebut dengan wilayah semrawut atau pencomberan. Adapun



pendapat lain dari permukiman kumuh juga dijelaskan oleh Johan Silas (2002:32) yaitu terdapat dua bagian dalam mengartikan permukiman kumuh, yang pertama ialah permukiman kumuh adalah kawasan yang proses pembentukannya karena kota memiliki keterbatasan menampung dalam perkembangan kota yang pesat sehingga timbul persaingan dalam menggunakan lahan yang ada diperkotaan. Kawasan permukiman berkepadatan tinggi merupakan cikal bakal tumbuhnya permukiman kumuh. Dan yang kedua ialah kawasan yang lokasi penyebarannya secara geografis terdesak perkembangan kota yang pada awalnya baik namun lambat laun berubah menjadi kumuh, penyebabnya utamanya adalah mobilitas sosial ekonomi yang stagnan.

Karakteristik Pemukiman Kumuh

Permukiman kumuh pada umumnya ditandai dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, tingkat kepadatan bangunan yang sangat tinggi, tingkat kepadatan hunian sangat tinggi, kualitas rumah sangat rendah, tidak memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar seperti halnya air bersih, jalan, drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, ruang terbuka/rekreasi/sosial, perbelanjaan dan sebagainya. Selain itu juga ditandai dengan tingkat pendapatan penghuninya yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang sangat rendah, tingkat privasi keluarga yang rendah serta kohesivitas komunitas yang rendah karena beragamnya norma sosial budaya yang dianut (Fitria dan Setiawan, 2014:242).

Johan Silas (2002:42) merumuskan kriteria perkampungan kumuh secara umum : 1) Dalam banyak aspek dapat dikatakan mandiri dan produktif, namun tempatnya masih perlu dibenahi. 2). Fisik hunian keadaannya sangat minim dan lambat perkembangannya. Kondisinya sangat terbatas, namun masih dapat ditingkatkan; 3). Mata pencaharian para penghuni lingkungan pemukiman kumuh pada

umumnya tidak tetap yaitu masuk dalam kategori usaha non formal dengan tingkat pendidikan rendah; 4). Secara umum para penghuni mengalami kemacetan mobilitas pada tingkat yang paling bawah, meskipun tidak miskin serta tidak menunggu bantuan pemerintah, kecuali dibuka peluang untuk mendorong mobilitas tersebut; 5) Memiliki kemungkinan terlayani berbagai fasilitas kota dalam kesatuan program pembangunan kota pada umumnya. 6) Kehadirannya perlu dilihat dan diperlukan sebagai bagian sistem kota yang satu, tetapi tidak semua begitu saja dapat dianggap permanen.

Sedangkan pemukiman kumuh memiliki kriteria yang dirumuskan oleh Silas (2002:43) adalah sebagai berikut: 1) Umumnya pemukiman kumuh menempati lahan yang dekat dengan pasar kerja (non-formal), terdapat sistem transportasi yang memadai dan dapat dimanfaatkan secara umum walau tidak selalu murah; 2) Kehadiran permukiman kumuh tidak diinginkan oleh umum (kecuali yang berkepentingan); 3) Cenderung tidak mendapat pelayanan berbagai fasilitas kota; 4) Dengan keadaan fisik yang serba terbatas, penghasilan penghuninya amat rendah (miskin); 5) Umumnya Berlokasi ditempat yang tidak legal.

Kepemimpinan dan Pemberdayaan Komunitas

Pada umumnya pemberdayaan memiliki berbagai macam pengertian, beberapa pengertian pemberdayaan dari para tokoh, diantaranya adalah sebagai berikut: Eddy Papilaya menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Zubaedi, 2007: 42). Pengertian yang hamper sama diungkapkan oleh Ginandjar (2010:73) yang mengatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan



kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Sementara itu Payne mengatakan bahwa suatu pemberdayaan (empowerment), intinya bertujuan untuk membantu klien agar memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan apa yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk bagaimana cara mengurangi efek hambatan pribadi dan hambatan sosial dalam melakukan tindakan, hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungan. (dalam Adi, 2008:78).

Pemberdayaan komunitas dalam pembangunan sesungguhnya sejalan dengan perubahan pengertian partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan definisi dari PBB (dalam Sadan, 1997:34) dapat disimpulkan paling tidak terdapat 6 unsur dalam pemberdayaan komunitas yang sangat penting, yaitu: (1) sekelompok orang (a group of people), (2) dalam sebuah komunitas (in a community), (3) mencapai keputusan bersama (reaching a decision), (4) untuk merencanakan dan melaksanakan proses aksi sosial (to initiate a social action process / planned intervention), (5) untuk merubah (to change), (6) situasi ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan mereka (their economic, social, cultural, or environmental situation).

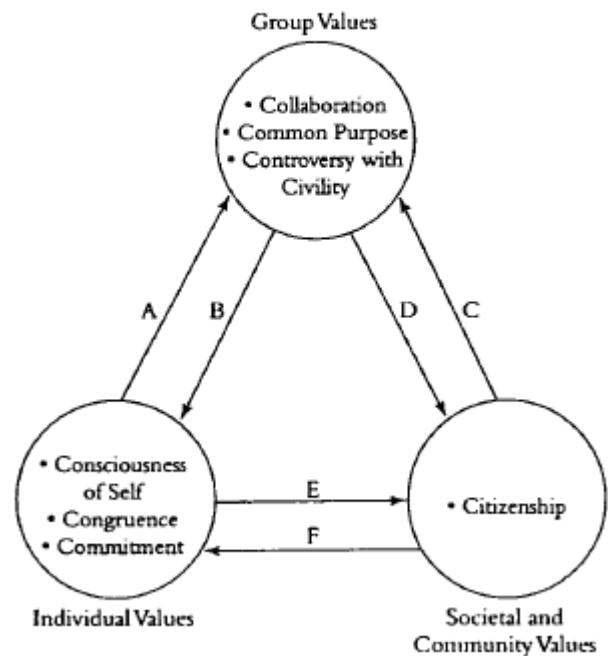
Kepemimpinan Berbasis Komunitas

Kepemimpinan komunitas (community leadership) memiliki perbedaan yang mendasar dengan konsep kepemimpinan lain. Sebab, kepemimpinan komunitas dilakukan pada kondisi dengan perbedaan struktur dan tujuan baik pada anggota maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Kepemimpinan komunitas juga tidak menggunakan kewenangan dan otoritasnya dapat secara sendirian dalam mencapai tujuan, namun harus bersama-sama dengan yang lain (Ricketts, 2011:274). McMillan dan Chavis (1986:239) mendefinisikan komunitas dengan empat dimensi: keanggotaan, pengaruh, penguatan

dan hubungan emosional bersama. Orang-orang merasa seperti mereka milik suatu kelompok (keanggotaan) dan mereka, atau setidaknya merasa seperti mereka, mampu membuat perbedaan dan pengaruh dalam kelompok itu (McMillan dan Chavis, 1986).

Basis konseptual untuk model kepemimpinan dalam sebuah komunitas perubahan sosial menekankan tindakan kolektif, kekuatan bersama, dan komitmen penuh gairah untuk keadilan sosial, dan inklusi. Pemberdayaan dan tindakan kolektif muncul sebagai landasan kepemimpinan yang dilakukan sebagai agen perubahan sosial. Tindakan kolektif mengambil bentuk perilaku sinergis dari berbagi tanggung jawab dan mendistribusikan tugas sesuai dengan bakat, pengetahuan, dan keahlian masing-masing anggota kelompok yang unik, dimana kelompok berkembang dan berfungsi secara kolektif. Kepemimpinan itu tidak hierarkis melainkan tertanam dalam nilai-nilai yang jelas (Astin, 1996:3).

INTERCONNECTIONS AMONG THE SEVEN VALUES



Sumber: Helen S. Astin, 1996

Complex Leadership Theory (CLT)

Complex Leadership Theory (CLT) yang menciptakan penyelesaian dari masalah-



masalah yang dihasilkan berdasarkan interaksi manusia dengan lingkungannya, dalam konteks penelitian ini ialah kampung kumuh. Acuan yang digunakan merupakan kepemimpinan kompleks dan kolaboratif dari Onyx dan Leonard (2010). Berdasarkan penelitian Onyx dan Leonard (2010) melalui studi kasus yang dilakukan di lima tempat di negara Australia, Swedia dan Afrika Selatan, terdapat tujuh elemen penting dalam kepemimpinan komunitas.

Tujuh elemen menurut Onyx dan Leonard (2010: 53-55) tersebut ialah: (1) Pemimpin yang tertanam dalam komunitas. Dalam setiap kasus, pemimpin atau kelompok kepemimpinan yang teridentifikasi tertanam kuat dalam jaringan formal dan informal komunitas, tetapi pada awalnya tidak berada dalam posisi otoritas formal. Dalam kebanyakan kasus, mereka mengambil peran inisiasi aktif dalam membangun proyek; (2) Keputusan dihasilkan bersama-sama. Pemimpin dalam sebuah komunitas tidak pernah membuat keputusan sendirian. Sebagian besar pekerjaan awal proyek membutuhkan negosiasi yang luas dengan pelbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar masyarakat, serta terkadang membutuhkan konsensus yang dinegosiasikan dari posisi yang sangat berbeda; (3) Sistem terbuka. Dalam elemen ini, para pemimpin komunitas sangat menghargai bahwa mereka bekerja dengan sistem terbuka, sekaligus mereka perlu terlibat dengan tempat dan struktur lain; (4) Pemimpin mempunyai visi. Para pemimpin memiliki visi yang luas untuk apa yang mungkin terjadi di masa depan bagi masyarakat. Mereka mampu mengartikulasikan visi ini dan mengidentifikasi jalan untuk mencapainya; (5) Keterampilan dan manajemen pemimpin. Meskipun bergerak dalam sebuah komunitas, para pemimpin harus menyadari bahwa untuk mewujudkan visi yang baik, mereka harus memiliki kemampuan manajerial dengan penetapan prosedur dan protokol dasar; (6) Perencanaan suksesi kekuasaan. Pemimpin komunitas harus

menjamin keberlanjutan komunitasnya meskipun kepemimpinan telah berganti. Kadang-kadang suksesi adalah melalui proses pemilihan formal, tetapi kadang-kadang proses ini dapat terjadi secara bertahap, karena orang lain mempelajari keterampilan; (7) Energi, komitmen, dan ketekunan seorang pemimpin. Memimpin sebuah perubahan dalam komunitas akan menghadapi pelbagai tantangan, baik dari internal maupun eksternal komunitas dengan pelbagai aspek ancaman. Kemampuan sikap dari seorang pemimpin menjadi bagian penting. Ketujuh elemen itu akan dijadikan sebagai kerangka berpikir yang kemudian didukung oleh pelbagai teori tambahan yang melengkapi kompleksitas dari masing-masing elemen tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dimana penelitian diawali dengan menguji teori, kemudian dilakukan pengumpulan data yang mendukung atau menyangkal teori, lalu disusun perbaikan yang dibutuhkan (Creswell, 2008). Pendekatan ini berpandangan bahwa hasil akhir kebijakan sangat ditentukan oleh faktor-faktor kausatif atau faktor-faktor penyebab yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini dipilih karena dengan menggunakan metode ini maka peneliti dapat melakukan analisis secara mendalam terhadap fenomena yang terjadi untuk menemukan makna dalam konteks yang sesungguhnya (Yusuf, 2014). Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif yang berbentuk kata-kata tertulis maupun lisan. Data ini diperoleh dari pengamatan terhadap perilaku orang-orang yang diamati (Moleong, 2013).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara dilakukan dengan berhadapan-hadapan secara langsung dan secara online yaitu melalui aplikasi zoom meeting. Studi literatur dilakukan dengan



mengumpulkan dan melakukan studi terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian seperti makalah, jurnal, laporan, website serta sumber-sumber lainnya. Informan yang dipilih adalah informan yang menguasai informasi yang dibutuhkan sehingga peneliti dapat mendalami obyek penelitian dengan mudah dan komprehensif. Informan yang dipilih adalah informan yang memiliki kompetensi dalam bidang yang diteliti serta informan yang terlibat dalam perubahan lingkungan kumuh yang diteliti, seperti Camat Grogol Petamburan, Lurah Kelurahan Tomang, Ketua RW 014 Kelurahan Tomang, LMK RW 014 Kelurahan Tomang, Ketua RT beserta warga RW 014 Tomang dan instansi terkait lain di pemerintah pusat.

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu analisis data yang prosesnya terjadi secara berkelanjutan, untuk itu diperlukan adanya refleksi data secara terus menerus, menyampaikan pertanyaan analitis dan mencatat hal penting selama proses penelitian. Analisis data ini meliputi pengumpulan data, interpretasi data dan penyusunan laporan yang dilakukan secara bersamaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan RW kumuh di Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2017 memiliki 445 Rukun Warga (RW) yang termasuk dalam kategori kumuh. Dari jumlah tersebut, terdapat 15 RW masuk kedalam kategori kumuh berat, sementara 99 RW masuk dalam kategori kumuh sedang, lalu yang berstatus kumuh ringan adalah 215 RW, dan sisanya sebanyak 126 RW masuk ke dalam status kumuh sangat ringan. Dasar penilaian RW kumuh dapat dilihat dari beberapa variabel antara lain, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, kualitas bangunan yang buruk, kondisi ventilasi dan pencahayaan yang buruk, lalu kondisi jamban buruk, kondisi saluran air dan penerangan jalan umum. Bekerjasama dengan Satuan kerja Perangkat

Daerah (SKPD) per wilayah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana melakukan penataan RW kumuh tersebut sampai dengan 2022 (BPS, 2018).

Upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menata pemukiman kumuh di Jakarta mulai dari era Gubernur Sutiyoso sampai dengan Gubernur Anies baswedan dirasakan belum menyentuh seluruh RW kumuh di DKI Jakarta dan penanganannya belum maksimal sampai saat ini.

Dari permasalahan wilayah kumuh di DKI Jakarta diperlukan pemberdayaan masyarakat terkait peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya sendiri sehingga penyelesaian wilayah kumuh tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun juga dilakukan oleh partisipasi masyarakat setempat sehingga wilayah yang kumuh yang belum tersentuh penanganan oleh pemerintah dapat melaksanakan perbaikan wilayah secara mandiri dan ini tentunya dapat meringankan beban kerja pemerintah.

Penyelesaian permasalahan kampung kumuh yang berbasiskan komunitas sebenarnya juga tengah dikembangkan oleh UN Habitat, melalui pengembangan negara untuk mengaplikasikan kebijakan publik partisipatif (*participatory integrated approach*) yang membuat kebijakan publik dalam pengelolaan kampung kumuh menjadi lebih inklusif yang mengandalkan pergerakan nyata dari komunitas. Menurut UN Habitat, hal tersebut menjadi pintu masuk untuk transformasi dalam skala global, nasional, kota, dan komunitas dalam peningkatan kualitas hidup di kampung kumuh dan mencegah untuk tumbuhnya kampung kumuh yang baru.

Partisipasi masyarakat tentunya tidak lepas dari sosok kepemimpinan yang ada di wilayah karena kepemimpinan komunitas yang memiliki integritas terhadap wilayahnya dan juga bisa memotivasi masyarakat agar dapat selalu menjaga lingkungan sekitar. Sosok Ketua RW 014 kelurahan Tomang merupakan antitesa dari permasalahan RW kumuh di DKI Jakarta dimana sebagian besar wilayah RW



kumuh selalu menunggu bantuan dari pemerintah dalam penanganan wilayah namun RW 014 Tomang dapat membuktikan bahwa tanpa ada bantuan pemerintah, sesungguhnya penanganan RW kumuh juga dapat dilaksanakan secara mandiri dengan mengajak partisipasi masyarakat setempat secara konsisten.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepemimpinan Komunitas

a. Pemimpin yang tertanam dalam komunitas

Dalam setiap kasus, pemimpin atau kelompok kepemimpinan yang teridentifikasi tertanam kuat dalam jaringan formal dan informal komunitas, tetapi pada awalnya tidak berada dalam posisi otoritas formal. Dalam kebanyakan kasus, mereka mengambil peran inisiasi aktif dalam membangun proyek. Sosok ketua RW 014 Tomang dikenal sangat tegas dimata warga, selain karena profesinya sebagai polisi beliau menerapkan kedisiplinan kesemua ketua RT beserta warga, apabila ada yang melanggar maka mendapatkan sanksi yang tegas.

b. Keputusan dihasilkan bersama-sama

Pemimpin dalam sebuah komunitas tidak pernah membuat keputusan sendirian. Sebagian besar pekerjaan awal proyek membutuhkan negosiasi yang luas dengan pelbagai pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar masyarakat, serta terkadang membutuhkan konsensus yang dinegosiasikan dari posisi yang sangat berbeda. Proses pengambilan keputusan di RW 014 Tomang selalu dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dan tidak pernah keputusan diambil secara sepihak oleh ketua RW. Apabila ada hal yang perlu dikoordinasikan maka diwilayah RW 014 Tomang mengundang seluruh RT dan perwakilan warga untuk mendiskusikan penyelesaian permasalahan bersama-sama.

c. Sistem terbuka

Dalam elemen ini, para pemimpin komunitas sangat menghargai bahwa mereka bekerja dengan sistem terbuka, sekaligus

mereka perlu terlibat dengan tempat dan struktur lain. Setiap kegiatan perbaikan lingkungan baik terkait dengan perbaikan sarana prasarana dilakukan dengan keterbukaan baik yang berhubungan dengan pendanaan dan siapa saja yang akan melaksanakan kegiatan tersebut sehingga warga dapat mengetahui secara terbuka terkait informasi kegiatan.

d. Pemimpin mempunyai visi

Para pemimpin memiliki visi yang luas untuk apa yang mungkin terjadi di masa depan bagi masyarakat. Ketua RW 014 Tomang memiliki visi Lingkar hati yaitu lingkungan asri bersih dan tertata rapi dengan misi yaitu melepaskan diri dari status kumuh yang sudah melekat agar lingkungan yang sudah dikenal kumuh ini berubah menjadi lingkungan yang dikenal bersih dan tertata rapi.

e. Keterampilan dan manajemen pemimpin

Meskipun bergerak dalam sebuah komunitas, para pemimpin harus menyadari bahwa untuk mewujudkan visi yang baik, mereka harus memiliki kemampuan manajerial dengan penetapan prosedur dan protokol dasar. Secara kepemimpinan sosok RW 014 Tomang memiliki keterampilan memimpin yang baik, mengatur wilayah bersama sama dengan ketua RT dengan menyusun strategi perbaikan lingkungan baik perbaikan sarana dan prasana wilayah maupun perbaikan budaya kerja gotong royong warga, pelaksanaan kebersihan rutin dilaksanakan seminggu sekali dan seluruh warga wajib berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, begitu juga dengan kegiatan keamanan lingkungan di RW 014 Tomang membuat jadwal rutin keamanan yang

f. Perencanaan suksesi kekuasaan

Pemimpin komunitas harus menjamin keberlanjutan komunitasnya meskipun kepemimpinan telah berganti. Kadang-kadang suksesi adalah melalui proses pemilihan formal, tetapi kadang-kadang proses ini dapat terjadi secara bertahap, karena orang lain mempelajari keterampilan. Dalam pergantian kepemimpinan diharapkan pa yang telah dicapai hari ini dapat dipertahankan bahkan sebisa



mungkin dapat ditingkatkan lagi prestasinya. Keberlanjutan kepemimpinan yang tegas tentu sangat diharapkan ketua RW 014 Tomang agar dapat mempertahankan apa yang telah dicapai, maka dari itu regenerasi kepemimpinan dimulai dari para Ketua RT yang telah dibimbing untuk melanjutkan tampuk kepemimpinan selanjutnya begitupula dengan kepemudaan dibina untuk belajar berorganisasi di wilayah dan menciptakan inovasi untuk perbaikan lingkungan.

g. Energi, komitmen, dan ketekunan seorang pemimpin

Memimpin sebuah perubahan dalam komunitas akan menghadapi pelbagai tantangan, baik dari internal maupun eksternal komunitas dengan pelbagai aspek ancaman. Tantangan yang dihadapi wilayah RW 014 Tomang adalah kesadaran diri masyarakat terkait kebersihan lingkungan, namun dapat diatasi dengan kedisiplinan yang telah dibangun menjadi budaya warga sehingga konsistensi menjaga lingkungan dapat terjaga dengan baik atas energi yang besar yang diberikan oleh sosok ketua RW 014 Tomang yang selalu memotivasi warganya agar selalu sadar bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah sebuah keharusan dan manfaatnya dapat dirasakan sendiri oleh warga.

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelesaian masalah penyelesaian RW kumuh di DKI Jakarta belum berjalan secara maksimal sehingga sampai saat ini Provinsi DKI Jakarta masih terdapat RW kumuh ditengah perkotaan.. Penyelesaian RW kumuh tentunya harus didukung oleh stakeholder baik di tingkat pusat maupun daerah, yang diharapkan perlahan lahan dapat menyelesaikan permasalahan RW kumuh, namun penyelesaian masalah RW kumuh juga dapat dilaksanakan swadaya oleh masyarakat setempat dengan kepemimpinan komunitas yang memiliki integritas tinggi untuk menjaga lingkungan yang baik tanpa menunggu bantuan dari pemerintah sehingga masyarakat bergerak

dengan kesadaran tinggi untuk memperbaiki lingkungannya masing-masing.

Penyelesaian penataan permukiman kumuh selama ini dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, namun pemerintah memiliki kemampuan terbatas dalam menangani wilayah permukiman kumuh sehingga sebagai alternatif penyelesaian RW kumuh adalah dengan kepemimpinan komunitas yang dapat memberdayakan warganya untuk bekerja bersama sama untuk menjaga dan memperbaiki lingkungannya sehingga beban pemerintah dapat terbantu dalam menyelesaikan permukiman kumuh.

Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan komunitas meliputi 7 aspek yaitu pemimpin yang tertanam dalam komunitas, keputusan dihasilkan bersama-sama, sistem terbuka, pemimpin mempunyai visi, keterampilan dan manajemen pemimpin, perencanaan suksesi kekuasaan, energi komitmen dan ketekunan seorang pemimpin. Dari faktor tersebut terlihat sangat dipengaruhi oleh aktor pemimpin yaitu ketua RW 014 Tomang yang memiliki visi misi yang kuat untuk perbaikan lingkungan, sosok yang berwibawa dan memiliki sikap yang tegas terhadap perbaikan lingkungan, memotivasi warga dalam menumbuhkan kesadaran diri untuk selalu menjaga lingkungan dan dikenal memiliki sikap terbuka terhadap segala saran/masukandimana tingkat perubahan yang diharapkan dipahami oleh semua warga dan dapat diikuti dengan tindakan nyata dalam mewujudkan perubahan yang diharapkan.

Saran

Penyelesaian penataan pemukiman kumuh ini perlu didukung oleh semua pihak baik pusat dan daerah begitu juga dengan kepemimpinan wilayah di lingkungan kumuh sebaiknya dipegang oleh sosok yang tegas dan memiliki integritas tinggi dalam upaya perbaikan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat dalam upaya menyelesaikan pemukiman kumuh nyatanya cukup efektif dalam usaha mengurangi jumlah RW kumuh yang ada sehingga dapat membantu mengurangi beban pemerintah yang memiliki keterbatasan dalam



menyelesaikan RW kumuh. Penyelesaian RW kumuh secara swadaya oleh masyarakat setempat merupakan alternative upaya untuk mengurangi jumlah wilayah kumuh tanpa harus mengeluarkan anggaran dari pemerintah

Apabila semangat memperbaiki lingkungan ini diterapkan diseluruh wilayah kumuh maka tidak mungkin penyelesaian lingkungan kumuh akan lebih cepat teratasi.

Pemerintah perlu mendata ulang jumlah RW kumuh di DKI Jakarta dan menginventarisasi kepemimpinan komunitas didalamnya dan bila perlukan diadakan pelatihan kepemimpinan khusus pimpinan wilayah RW kumuh untuk bisa menyelesaikan perbaikan wilayah dengan menggerakkan masyarakat dan meningkatkan keadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman dan layak ditinggali.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adi, Isbandi Rukminto, Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat, dan Intervensi Komunitas. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001.
- [2] Adisasmita, Rahardjo . 2010. Pembangunan Kota Optimum, Efisien & Mandiri. Yogyakarta : Graha Ilmu
- [3] Adisasmita, *Rahardjo*, 2010, Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan, Graha. Ilmu, Yogyakarta
- [4] *Agustinus*, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- [5] Alsadad,Rudi.2017,Oktober.<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/10/13/07123951/kampung-deret-janji-kampanye-jokowi-ahok-yang-tak-terwujud>
- [6] Anderson, James E, 2003, Public Policy Making: An Introduction Fifth Edition, Boston: Houghton Mifflin Company.
- [7] Anne Schneider. 2012. Policy Design and Transfer (217-228) in Routledge Handbook of Public Policy.
- [8] Astin, Helen S., 1996. Leadership: For Social Change.Higher Education Research Institute of the University of California-Los Angeles.
- [9] Aziza,SariKurnia.2012,November.<https://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/05/2027291/kampung.deret.susun.program.unggulan.jokowi.2013>
- [10] Bhatkal, Tanvi dan Lucci, Paula. 2015. Community-Driven Development in The Slums: Thailand's Experience. London: Overseas Development Institute.
- [11] Bisnis.com.2018,September.<https://jakarta.bisnis.com/read/20180906/77/835788/program-cap-kecewakan-warga-bukit-duri-begini-komentar-anies>.
- [12] BPS.2018.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/08/445-rw-di-dki-jakarta-masuk-kategori-kumuh> .
- [13] Brooks, Ian. (2006). Organisational Behaviour: Individual, Group, and Organization. London: Pearson Education.
- [14] Chambers, Robert. 1980. Rural Development: Putting the Last First, Longman Scientific and Technical, New York, 1987.
- [15] CNN Indonesia.2019, September.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190903212554-20-427289/kawasan-kumuh-indonesia-meluas-dua-kali-lipat>
- [16] CNN Indonesia.2019, November.<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191105103604-20-445706/daftar-anggaran-puluhan-miliar-anies-yang-jadi-perdebatan>.
- [17] Marcuse, Peter. 1971. Social Indicators and Housing Policy. Urban Affairs Review 1971 7: 193.
- [18] Martiskainen, Mari. 2016. The Role of Community Leadership in The Development of Grassroots Innovations. Journal Environmental Innovation and Societal Transitions 22 (2017) 78–89.



- [19] Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA
- [20] McMillan, D.W., Chavis, D.M., 1986. Sense of community: a definition and theory. J. Community Psychol. 14, 6–23 (Special Issue: Psychological Sense of Community, I: Theory and Concepts).
- [21] Media Survei Nasional. 2017. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/03/27/apa-alasan-warga-dki-pilih-ahok#>
- [22] Morrell, K. and Hartley J. 2006. 'A Model of Political Leadership', Human Relations, 59(4): 483-504. Journal Human Relations, Volume 59 (4).
- [23] Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. The Politics of Policy Implementation, St. Martin Press, New York.
- [24] Nursyahbandi, Raisya, dan Piggawati Bitta. 2015. Kajian Karakteristik Kawasan Pemukiman Kumuh Di Kampung Kota. Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 2
- [25] Onyx, Jenny and Leonard, Jill Rosemary. 2010. Complex Systems Leadership in Emergent Community Projects. Community Development Journal Vol 46 No 4 October 2011 pp. 493–510.
- [26] Parsons, Wayne. 1995. Public Policy, an introduction to the theory and practice of policy analysis, St. Martin Press, New York.
- [27] Pigg, K. E. (1999). Community Leadership and Community Theory: A Practical Synthesis. Community Development Society. Journal, 30(2), 196–212.
- [28] Pülzl, H., & Treib, O. (2007). Implementing Public Policy. In F. Fischer, G. J. Miller, & M. S. Sidney, Handbook of Public Policy Analysis Theory, Politics, and Methods (pp. 89-107). New York: CRC Press Taylor & Francis Group
- [29] Rabin, Jack. 2005. Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Taylor & Francis Group, LLC USA.
- [30] Rahman, Eri. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Kebijakan Publik Tentang Kewajiban Melengkapi Tempat Sampah Di Dalam Mobil Sebagai Upaya Terwujudnya Civic Responsibility. Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu
- [31] Ricketts, C. 2011. Leadership Personal Development And Career Success Third Edition. USA Clifton Park, NY: Delmar
- [32] Ricketts, K. G. (2005). The Importance of Community Leadership to Successful Rural Communities in Florida [University of Florida]
- [33] Ripley, Randall B. Dan Franklin, Grace A. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy. Chicago: The Dorsey Press.
- [34] Robson, Terry. 2000. The State and Community Action. London: Pluto Press.
- [35] Sadan, Elisheva. 1997. *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad.
- [36] Sholichin Abdul Wahab, 1997, Evaluasi Kabijakan Publik, Penerbit Balai Pustaka Jakarta.
- [37] Silas, Johan. 1996. Permukiman kumuh di Jakarta Tinjauan Kontradiktif Komparatif. Masyarakat Jurnal Sosiologi 2.
- [38] Silver, Christopher. 2007. Planning the Megacity: Jakarta in The Twentieth Century. 2007. USA: Routledge.
- [39] Uhl-Bien, M., Marion, R., McKelvey, B., 2007. Complexity Leadership Theory: shifting leadership from the industrial age to the knowledge era. LeadershipQ. 18, 298–31
- [40] Yusuf, A., Muri (2014). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN